

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Rahmat Fauzi Athariq

19060056

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

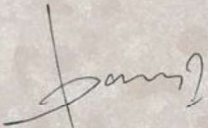
ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT


Nama : Rahmat Fauzi Athariq
NIM/TM : 19060118/2019
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh :
Pembimbing


Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001


Mike Triani, Si., MM
NIP. 19840129 200912 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


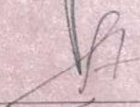

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Rahmat Fauzi Athariq
NIM/TM : 19060056/2019
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Februari 2024

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Mike Triani, SE, MM	1. 
2	Anggota	Drs. Ali Anis, MS	2. 
3	Anggota	Maizul Rahmizal, S.E.,M.Sc.	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rahmat Fauzi Athariq
NIM/TM : 19060056/2019
Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/17 Maret 2001
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Kapalo Koto, Kec. X koto, Kabupaten Tanah Datar
No. HP/Telepon : 085355669017
Judul Skripsi : Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah
di Provinsi Sumatera Barat

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), Baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2024

Yang Menyatakan,



Rahmat Fauzi Athariq

NIM. 19060056

ABSTRAK

Rahmat Fauzi Athariq (19060056) :“Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”. Di bawah bimbingan Ibu Mike Triani, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan induktif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui sumber sekunder seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menerapkan metode Random Effect Model (REM) terhadap cross section 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2013-2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat”. Sholawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu dan Berakhlak mulia. Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak, sehingga kesulitan yang dihadapi tersebut dapat teratasi, semua tidak terlepas dari do’a dan dukungan segenap keluarga besar. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan terhormat kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu menjadi alasan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan yang senantiasa memberikan nasehat, memberikan semangat baik moril maupun material kepada penulis.
2. Ibu Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia memberikan waktu, motivasi, tenaga dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku dosen penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Maizul Rahmizal, S.E.,M.sc selaku dosen penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
8. Staff Perpustakaan FEB UNP yang telah menyediakan berbagai referensi dan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kak Asma Lidya, AMd selaku Admin departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal pengurusan administrasi.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Masih banyak lagi pihak yang belum tersebut namanya, untuk itu peneliti mohon maaf, dan semoga bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat pahala dan balasan dari ALLAH SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi. Semoga hasil penelitian ini nantinya bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2024

Rahmat Fauzi Athariq

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Definisi Operasional.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
d. Jumlah Penduduk	55
B. Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan PAD Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022	4
Gambar 1. 2 PDRB Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022 ...	6
Gambar 1. 3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022.....	8
Gambar 1. 4 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022	9
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Analisis Determinan PAD Provinsi Sumatera Barat.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Uji Chow	56
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Uji Hausman.	57
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Uji Hausman	58
Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten/kota, dan setiap kabupaten/kota juga Daerah/kota memiliki kepala daerah. Indonesia memiliki banyak daerah sehingga pemerintah pusat memiliki tanggung jawab lebih dalam mengurus setiap daerah. Dalam mengoptimalkan layanan dan pengaturan pemerintah, pemerintah pusat mengubah kebijakan sebelumnya, Sesuai Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengubah asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi yaitu kewenangan mengatur dan mengurus berpindah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting untuk mendekatkan pemerintah dan pembangunan masyarakat, serta kewenangan pemerintah daerah yang dimiliki ini menjadikan fungsi pemerintah dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Wujud dari kebijakan desentralisasi ialah lahirnya otonomi daerah.

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Undang – Undang. Pemerintah melayani masyarakat dan memfasilitasi masyarakat mengawasi dan mengontrol penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta meningkatkan daya saing sebuah daerah dengan kekuatan

tersebut diharapkan pemerintah daerah lebih mampu mencari sumber keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan Pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pembiayaan urusan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Halim, (2014) peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Hal ini selaras dengan pendapat Mardiasmo, (2016) yang mengatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah akan berdampak pada peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana kemandirian daerah ini merujuk pada kemampuan daerah otonom untuk mengelola dan menggali sumber keuangan daerah itu sendiri. Sehingga PAD dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, di mana kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari penerimaan komponen - komponen PAD itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

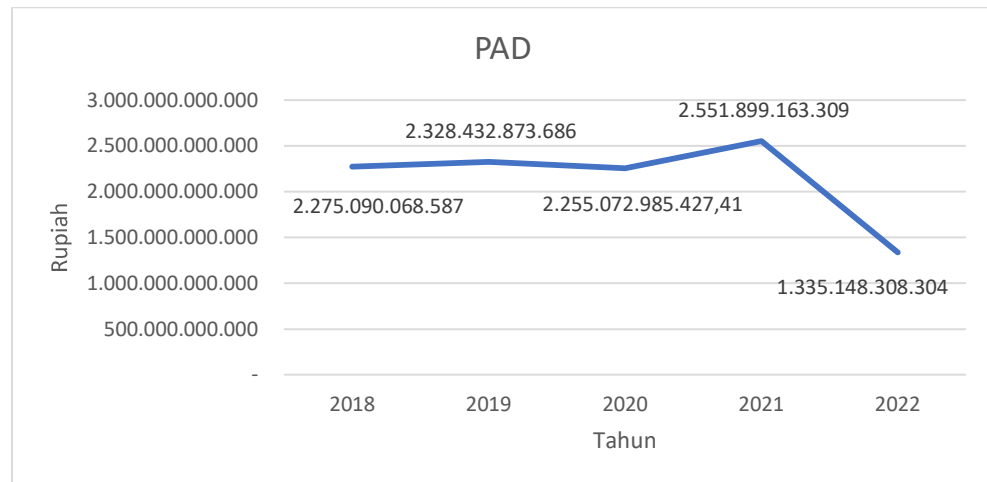
Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah Hasil dari pajak daerah, distribusi hasil dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). upaya peningkatan pendapatan fiskal daerah harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari segi daerahnya masing-masing, tetapi hubungannya dengan kesatuan ekonomi Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Sehingga Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan segala potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat memberikan gambaran positif terhadap tuntunan otonomi daerah, yaitu manajemen keuangan daerah yang baik, efisien dan efektif, serta kemampuan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan upaya pengembangan sektor ekonomi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta memajukan sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut. Berikut ini adalah Perkembangan PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022.

Gambar 1. 1 Perkembangan PAD Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2022 mengalami Fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari PAD pada tahun 2018 sebesar Rp 2.275,09 (Milyar) ke tahun 2019 sebesar Rp 2.328,43 (Milyar) mengalami kenaikan lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 2.255,07 (Milyar) begitu seterusnya. Dan penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 2.551,90 (Milyar) ke tahun 2022 sebesar Rp 1.335.15 (Milyar)

Realisasi penerimaan PAD dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya penurunan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah diprovinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu realisasi total penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang signifikan.

Menurut Jolianis, (2012) Salah satu manfaat dari kajian PAD yaitu untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah tersebut. Semakin besar tingkat

penerimaan PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki perekonomian yang bagus. Namun sebaliknya, apabila tingkat penerimaan PAD daerah semakin rendah, maka menunjukkan perekonomian daerah tersebut kurang baik.

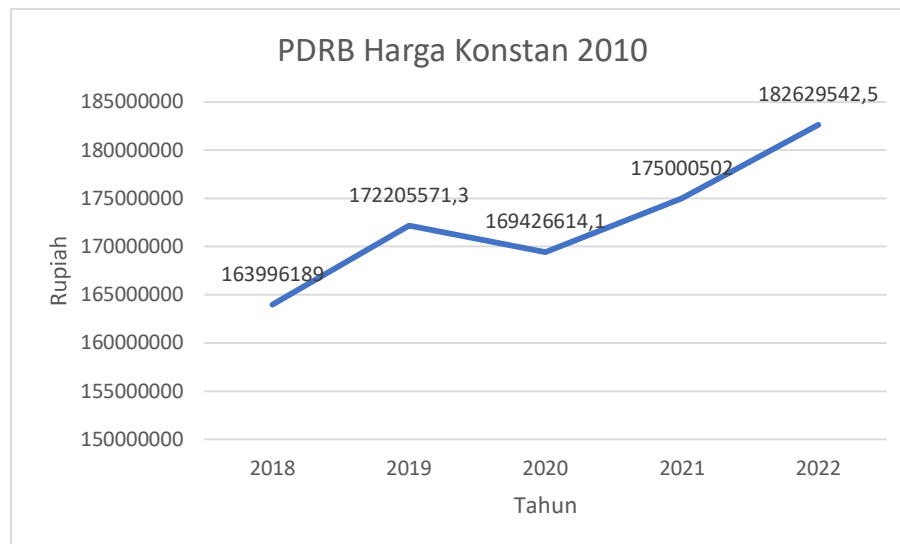
Fattah & Irman, (2012) Provinsi yang mempunyai tingkat penerimaan PAD yang tinggi menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki ketergantungan yang rendah terhadap keuangan pusat. Berbeda dengan provinsi yang memiliki tingkat penerimaan PAD yang rendah, maka akan cenderung membutuhkan dana lain untuk pembiayaan berbagai pengeluaran suatu daerah.

Menurut Brata, (2004) PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD.

Sukirno, (2003) menyatakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan dalam perkembangan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal dinegara tersebut.

Gambar 1. 2 PDRB Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto harga Konstan Tahun 2018-2022 Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2018 ke 2022. Hal ini dapat dilihat Pada tahun 2018 sebesar Rp 163996189.04 (Juta) ke 2019 sebesar Rp 172205571.30 (Juta) mengalami kenaikan dan sama halnya juga pada tahun 2020 sebesar Rp 169426614.10 (Juta) ke 2021 sebesar Rp 175000501.95 (Juta).

Berdasarkan Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa PDRB harga konstan tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Ditahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah tak terkecuali diprovinsi Sumatera Barat, yang pada akhirnya membuat perekonomian melemah, tidak adanya produksi dan pada akhirnya mengakibatkan PDRB di Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditahun selanjutnya, PDRB diprovinsi ini mengalami peningkatan yang ditandai oleh mulai dilonggarnya aturan PSBB dan mulai dilonggarkannya *social distancing* oleh Pemerintah Pusat. Ditahun terakhir PDRB di Sumatera Barat berada diangka 175000501.95 (juta rupiah).

Saragih, (2003) Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PDRB. Pendapat ini sejalan dengan Halim, (2000), bahwa PAD dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto.

Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

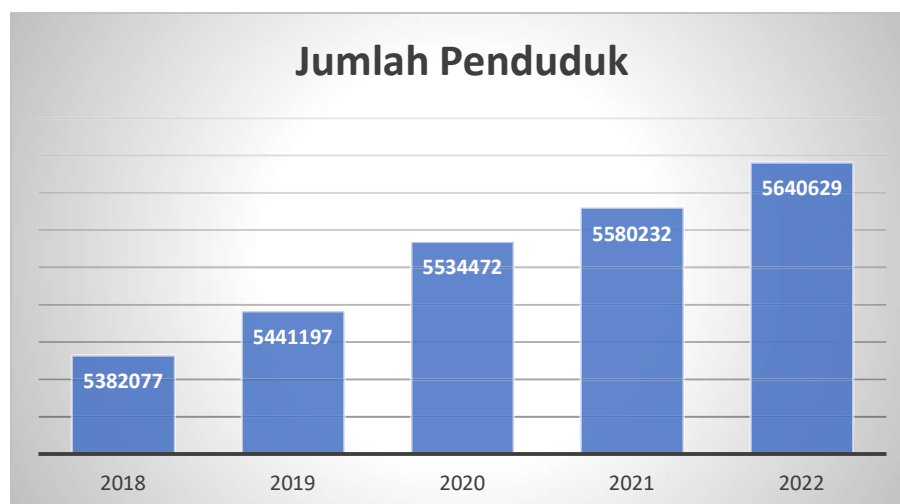
Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah sebesar 6.320.806.231,09 lalu naik menjadi 6.625.719.980,63 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6.440.700.788,34. Kenaikan terjadi kembali pada tahun 2021 sebesar 6.483.906.658,35. Dan terakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6.224.281.123,95.

Gambar 1.3 dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya stimulus bantuan belanja modal dari pemerintah pusat (BI, 2019), setelah itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022, realisasi pengeluaran pemerintah Sumatera Barat terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan

adanya pandemi covid-19 sehingga mengurangi pendapatan pemerintah dan realisasi pengeluaran pemerintah pun belum menunjukkan tanda-tanda akan meningkat semenjak covid-19. Pengeluaran pemerintah juga berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong perekonomian agar semakin meningkat.

Mangkoesbroto, (2001) Pengeluaran Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan kerika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat mencerminkan suatu kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan mengenai suatu kebijakan untuk pembelian barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Gambar 1. 4 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2022



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Gambar 1.4 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2022 yaitu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun faktanya peningkatan jumlah penduduk tidak dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. Meningkatnya jumlah penduduk diprovinsi Sumatera Barat, dikarenakan meningkatnya angka kelahiran bayi hidup dan adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota.

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Menurut Kuncoro, (2014) apabila Jumlah Penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasa maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan jumlah penduduk di daerah terhadap PAD dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul “**Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Se jauh mana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat
2. Se jauh mana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat
3. Se jauh mana Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat
4. Se jauh mana pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang cocok untuk penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui se jauh mana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk di kab/kota Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang penelitian ilmiah dan memberikan gambaran yang jelas bagi penulis tentang Pendapatan Asli Daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Barat
 - b. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S1 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
2. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan dan merencanakan kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat
3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu literatur bagi peneliti lain yang ingin meneliti atau mengembangkan masalah

mengenai Pendapatan Asli Daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat.